

ARAH BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

By TRIWAHYUNINGSIH

WORD COUNT

4831

TIME SUBMITTED

20-DEC-2018 09:22PM

PAPER ID

42982870

PROCEEDING INTERNATIONAL SEMINAR

Pendidikan Kewarganegaraan
Sebagai Bidang Keilmuan dan Program Pendidikan
Dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan

Selasa, 15-16 November 2016
Gedung Achmad Sanusi
Universitas Pendidikan Indonesia

Editor:
Sapriya
Syaifullah
Susan Fitriasari
Leni Anggraeni
Dede Iswandi
Dwi Iman Muthaqin
Diana Noor Anggraini
Riyan Yudistira



LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ardian Bakhtiar Rival, M.A., M.Sc
NIP. 60140770

Proceeding

Internasional Seminar

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bidang Keilmuan
dan Program Pendidikan Dalam Konteks Penguatan
Daya Saing Lulusan

Selasa, 15-16 November 2016
Gedung Achmad Sanusi
Universitas Pendidikan Indonesia

Editor:
Sapriya
Syaifullah
Susan Fitriasaki
Leni Anggraeni
Dede Iswandi
Dwi Iman Muthaqqin
Diana Noor Anggraini
Riyan Yudistira



LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Prosiding Seminar Internasional

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bidang Keilmuan dan Program Pendidikan
Dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan

ISBN 978-602-8418-28-7

Editor:

Sapriya
Syaifullah
Susan Fitriani
Leni Anggraeni
Dede Iswandi
Dwi Iman Muthaqin
Diana Noor Anggraini
Riyan Yudistira

Penerbit

Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Prosiding Seminar Internasional dengan tema “Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bidang Keilmuan dan Program Pendidikan Dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan”, yang diselenggarakan di Gedung Achmad Sanusi Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung pada tanggal 16 November 2016.

Semangat yang hendak dibangun melalui kegiatan Kongres dan Seminar Internasional ini adalah refleksi kritis dari para komunitas akademik PKn dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, untuk bersama-sama memberikan kontribusi pemecahan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam rangka membangun kemandirian dan martabat bangsa Indonesia.

Ide awal dari kegiatan AP3KNI kali ini adalah menyamakan visi dan misi organisasi yang berorientasi pada program aksi nyata dari seluruh komunitas akademik PKn dan untuk menjaga eksistensi serta berkelanjutan program yang dituangkan dalam tulisan-tulisan dalam prosiding ini.

Pada kesempatan ini, tim editor menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama, sehingga prosiding ini dapat diterbitkan dengan baik. Tidak lupa dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam prosiding ini masih terdapat hal-hal yang dirasa belum memadai atau sesuai dengan harapan.

Untuk itu, demi penyempurnaan prosiding ini, kami sangat berharap sumbang saran atau masukan yang konstruktif dari para pembaca yang budiman. Kami sangat berbesar hati untuk menerima saran tersebut.

Selamat membaca

Bandung, 7 November 2016

Tim Editor,

NAWACITA:
ARAH BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Ardian Bakhtiar Rivai
Universitas Ahmad Dahlan
ardian.rivai@ppkn.uad.ac.id

Triwahyuningsih
Universitas Ahmad Dahlan
triweppknuad@yahoo.com

Susena
Universitas Ahmad Dahlan
ihsusen@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menawarkan gagasan tentang arah baru pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pijakan utama untuk mencapai arah baru ini adalah sembilan prinsip cita-cita yang menjadi pedoman menyeluruh terhadap roda pemerintahan saat ini. Sembilan prinsip yang terkandung dalam Nawacita menjadi konsep metodologi penulisan artikel ini untuk menjawab masalah-masalah penting pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Tulisan ini berkesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang sudah dan sedang berlangsung saat ini harus dimaknai sebagai pendidikan yang membebaskan manusia dari penjara berfikir dalam ritual doktrinasi. Pendidikan kewarganegaraan juga harus digagas sebagai proses yang meruntuhkan tembok-tembok formalitas yang hanya menganggap pendidikan kewarganegaraan hanya sebatas kewajiban bukan sebagai kebutuhan.

Kata Kunci: Pendidikan, Kewarganegaraan, *Nawacita*.

This article aims to promote the concept of new orientation for civics education in Indonesia. A new orientation on this idea based on nine paradigms which directed the Indonesian government. Nine principles which contain in *Nawacita* use to concept of methodology in this article for answer all of urgent problem on civics education in Indonesia. In conclusion, civics education must make people feel free from ritual and doctrine which make limited thinking. Civics education must interpret for processes to destructing the walls of formalism which argue that civics education only for duties not for needs.

Keyword: Civics, Education, *Nawacita*

Pendahuluan

Nawacita sebagai hutang konstitusi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah arah politik dan pemerintahan yang ditempuh oleh segenap warga negara Indonesia saat ini. Dengan menyandarkan diri pada konsep tersebut, artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan besar tentang *Quo Vadis* Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia?. *Quo vadis* yang dalam bahasa latin bermakna “mau dibawa kemana” adalah pertanyaan paling mendasar yang akan dijawab dalam tulisan ini. Artikel ini ditulis karena terinspirasi konsep pemikiran oleh (Diaz & McGee, 2006) tentang model manajemen ilmu pengetahuan terbuka yang sangat terkenal dan berkembang dengan sangat pesat di The University of Arizona, USA.

Untuk bisa memahami *Nawacita* yang menjadi visi besar Presiden saat ini, ada baiknya kita lepaskan dulu atribut politik yang melekat pada diri sebagai pendidik. Bahwa kemudian, orientasi politik yang secara subjektif berbeda dengan *status quo* saat ini, turut mensukseskan pemerintahan yang berdaulat yang bernama Indonesia, adalah tanggung jawab dan kerja gotong royong secara komunal. Artikel ini tidak bermaksud mengabaikan orientasi politik yang bertolak belakang dengan pemerintahan *quo*, tetapi lebih mengajak seluruh pemangku kepentingan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebagai bagian yang integratif dalam mengarahkan mata pelajaran ataupun mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan tuntutan rezim dan zaman.

Dalam perenungan singkat yang sedang dikonstruksi dalam tulisan ini, agaknya ada empat rumusan masalah mendasar yang belum terjawab meski Pendidikan Kewarganegaraan sudah diajarkan sejak negara ini ber-ijtihad untuk pendidikan. Pertama, menurut penulis Pendidikan Kewarganegaraan nampaknya semakin terjebak sebagai materi ajar yang simbolis. Semua institusi pendidikan mewajibkan peserta didik untuk menempuh materi ini tanpa didukung oleh tenaga pengajar yang memadai. Sehingga, yang terjadi adalah pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan hanya dimaknai atas simbol kepatuhan dan ketaatan pengelola pendidikan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi yang demikian akan memunculkan apa yang disebut oleh Freire (2007) sebagai “Kewajiban Humanis”. Pendidikan kewarganegaraan yang dijalankan secara simbolis hanya menciptakan robot-robot akademik untuk mengejar terpenuhinya kewajiban transkrip nilai tanpa memaknai tujuan besar Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri, kondisi politik pendidikan yang seperti ini hanya akan semakin melunturkan kemuliaan dan kewibawaan pendidikan (Freire, 2007).

Kedua, masalah yang masih dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat ini adalah masih dominannya pemahaman yang menurut Benedict Anderson disebut sebagai *imagined communities*. Dalam konsep masyarakat imajinatif, nasionalisme adalah hasil konstruksi sejarah budaya manusia (Greenfeld & Eastwood, 2005). Konsekuensi yang ditekankan oleh Benedict Anderson tentang masyarakat yang imajinatif ini hanya akan melahirkan generasi yang tidak

saling memahami satu dengan lainnya, anggota masyarakat yang seperti ini hanya memahami nasionalisme sebagai sebuah hayalan saja. Teori Anderson dalam (Greenfeld & Eastwood, 2005) nampaknya sangat relevan untuk merumuskan kondisi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Faktanya, meskipun semua sekolah, universitas, dan institusi pendidikan sudah mewajibkan Pendidikan Kewarganegaraan bagi semua peserta didiknya, kondisi intoleran, radikalisme, bahkan destruksi rasa kebangsaan justru semakin menggurita beberapa tahun terakhir. Ada semacam “gagal faham” yang penulis rasakan dengan Pendidikan Kewarganegaraan saat ini.

Ketiga, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia belum ditafsirkan sebagai sebuah kebutuhan sivitas akademika. Yang terjadi justru sebaliknya, Pendidikan Kewarganegaraan adalah semacam kewajiban yang apabila tidak dijalankan akan menyebabkan ketakutan tidak bisa lulus dari jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Paradigma yang demikian ini justru akan memperburuk capaian arah dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Karena, peserta didik menempuh Pendidikan Kewarganegaraan didasarkan atas niat paksaan bukan atas kebutuhan yang seharusnya menjadi prinsip dasar pendidikan (Rivai, 2015). Ada korelasi yang bertabrakan apabila Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan sebagai kewajiban semata. Peserta didik menjalankan rutinitasnya dalam Pendidikan Kewarganegaraan hanya untuk mengejar nilai tanpa ada misi untuk menuntaskan masalah kebangsaan yang seharusnya menjadi spirit warga negara. Sehingga masalah ketiga ini, nampaknya sangat penting juga untuk dirumuskan solusinya.

Keempat, masalah terakhir Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat ini yang belum menemukan ujung pangkalnya, adalah masih terpenjaranya Pendidikan Kewarganegaraan oleh kondisi “Formal” dalam menjalankan proses pendidikan. Terpenjaranya Pendidikan Kewarganegaraan dalam situasi formal tidak akan pernah melahirkan generasi nasionalis yang mengakar kuat dan dahanya menjulang kelangit. Pendidikan Kewarganegaraan yang “formal” hanya akan menciptakan nasionalisme semu yang tidak menusuk ke dalam jantung sanubari setiap warga negaranya. Penulis melihat ini sebagai sebuah realitas yang kontraproduktif dengan formalitas PKn. Seringkali, kita tidak pernah merasakan getaran denyut nadi nasionalisme di kelas penataran dan seminar Pendidikan Kewarganegaraan atau upacara kemerdekaan yang diselenggarakan rutin setiap tahun di istana negara. Namun, getaran jiwa atau bahkan semangat nasionalisme justru dapat dengan mudah kita temui di gelanggang olah raga seperti pertandingan sepak bola, kejuaraan bulu tangkis, atau olimpiade dunia yang melantunkan lagu Indonesia Raya dengan kibaran sang saka merah putih saat atlet negara kita memenangkan kompetisi tersebut. Realitas kontraproduktif yang seperti ini adalah bentuk antitesis dari gagasan *Academic Freedom* seperti yang dikonsepsikan oleh Karran (2009). Bahwa pendidikan harus keluar dari penjara formalitas, pendidikan harus membebaskan manusia untuk belajar, mengajar, dan mengekspresikan ide yang menjelaskan tentang karakteristik dan konsep manusia yang berpendidikan (Karran, 2009).

Nawacita: Ijtihad Menjawab Masalah Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia

Ijtihad awal yang penulis lakukan untuk menjawab empat masalah seperti yang sudah dikemukakan di pendahuluan, nampaknya wacana Nawacita sebagai arah baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat ini sangat relevan untuk digaungkan. Pada hakikatnya, mewacanakan arah baru bukan berarti meninggalkan nilai-nilai luhur yang sudah bertahan tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang sedang dan sudah dilakukan saat ini. Tawaran gagasan ini hanya bentuk formula yang bisa menyempurnakan paradigma Pendidikan Kewarganegaraan di masa sekarang dan yang akan datang.

Ada sembilan prinsip yang terkandung dalam Nawacita yaitu pertama hadirnya kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kedua, Pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan, revolusi karakter bangsa. Kesembilan, memperteguh ke-Bhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sembilan prinsip dalam Nawacita inilah yang akan penulis gagas sebagai pilar arah baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat ini dan masa mendatang. Kesembilan pilar ini akan penulis formulasikan dengan model manajemen ilmu pengetahuan terbuka (Diaz & McGee, 2006). Ada empat model manajemen ilmu pengetahuan terbuka yang bisa digunakan dalam menganalisis prinsip Nawacita dan arah baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Pertama, model efisiensi arah perjalanan. Model ini menekankan kepada kita bahwa institusi harus bekerja secara bersama-sama, mengurangi pengulangan dalam usaha dan menghilangkan masalah-masalah yang timbul berdasarkan ide para pembelajar (Diaz & McGee, 2006).

Model kedua, arah pembaruan yang berpusat pada guru. Model ini menginspirasi kita sebagai pendidik untuk lebih banyak membagi sumber belajar dan praktik yang sudah sukses diterapkan, sehingga pengajaran lebih banyak menunjukkan improvisasi aktifitas yang melahirkan objek pembelajaran yang haus akan kreasi sebagai stimulus produksi (Diaz & McGee, 2006).

Model ketiga, arah pembaruan yang berpusat pada siswa. Model ini membuka peluang pembelajar untuk memiliki akses yang beragam dalam rancangan yang berbeda tentang kebutuhan belajar dalam pikiran serta dukungan lingkungan yang lebih baik. Model ini akan

melahirkan objek pembelajaran menjadi lebih terorganisasi dan berjejaring (Diaz & McGee, 2006).

Model keempat, kebebasan berpendapat. Model ini mendorong adanya pendidik yang memiliki dan mampu mendiseminasi secara bebas kepada komunitas pendidikan secara luas dengan mengesampingkan perjuangan atau perlawanan isu dan agenda institusi yang menciderai hak atas intelektual seperti nilai-nilai kearifan lokal (Diaz & McGee, 2006).

Kehadiran Negara, Perlindungan Bangsa, dan Rasa Aman

Prinsip nawacita pertama yaitu hadirnya ¹ kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Ada tiga kata kunci dalam nawacita pertama ini yang sangat relevan digunakan sebagai arah baru Pendidikan Kewarganegaraan. Tiga konsep ini sesungguhnya juga merupakan prinsip dasar dalam mewujudkan kesuksesan Pendidikan Kewarganegaraan di sebuah negara. Penulis mencoba merangkum tiga konsep ini sebagai satu kesatuan utuh yang mewarnai betapa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat sentral.

Pendidikan Kewarganegaraan saat ini seharusnya diarahkan menuju paradigma yang menuntut adanya kehadiran negara dalam setiap persoalan bangsa. Di sisi lain, kehadiran negara juga harus dimaknai sebagai sebuah cara untuk memaksa negara memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia. Sehingga, capaian akhir yang sangat dekat dengan kebutuhan warga negara adalah adanya rasa aman sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berdaulat. Dalam rangka mengkonstruksi kehadiran negara seperti ini, penulis meminjam teori tentang membangun negara seperti yang digagas oleh Ertman (2005) tentang apa yang dia sebut sebagai metode penguatan negara.

Ada empat metode yang bisa digunakan untuk memperkuat kehadiran negara, pertama birokratisasi dengan menganggap kantor sebagai tempat penjualan layanan prima kepada masyarakat (Ertman, 2005). Pemahaman ini sesungguhnya menjadi rujukan tentang bentuk hubungan yang mutualistik antara negara dan warga negaranya yang dibingkai dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Metode kedua, monopoli penciptaan kekuatan militer yang dominan. Metode ini nampaknya sangat relevan dengan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk injeksi penguatan nilai-nilai bela negara kepada seluruh peserta didik. Ketiga, penguatan legitimasi dengan nilai-nilai ketuhanan. Keempat, penguatan nilai budaya dan agama sebagai cara untuk membangun dan memperkuat kehadiran negara bagi seluruh elemen bangsa (Ertman, 2005).

Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya

Nawacita kedua menekankan kepada adanya kepercayaan warga negara kepada pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dan Demokratis. Prinsip kedua dalam Nawacita yang seperti ini merupakan bagian utuh yang menjiwai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk pembelajaran bagi warga negara untuk mendukung nilai-nilai ini. Pada hakikatnya, kepercayaan warga negara kepada pemerintahan bisa dimaknai dari dua sisi. Sisi pertama dimaknai sebagai awal proses terbentuknya pemerintahan yang bersih namun bisa juga dimaknai sebagai hasil dari proses pemerintahan yang dijalankan secara bersih. Bergantung bagaimana kita memilih sudut pandang ini dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan sat ini.

Ada dua sudut pandang yang bisa digunakan pendidikan kewarganegaraan dalam merancang dan memahami kepercayaan warga negara. Kepercayaan bisa muncul dari hasil proses tata pemerintahan yang dikelola secara bersih, efektif, dan demokratis. Tetapi kepercayaan juga bisa menjadi stimulus untuk lahirnya pemerintah yang bisa mengelola secara bersih, efektif, dan demokratis.

Membangun Indonesia Pinggiran, Memperkuat Desa, dan Negara Kesatuan

Terdapat tiga nilai utama yang terkandung dalam nawacita ketiga, yakni prioritas pembangunan Indonesia pinggiran, memperkuat keberadaan desa, dan menjaga keutuhan negara kesatuan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pilar untuk membangun Indonesia adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi segenap entitas bangsa Indonesia. Membangun Indonesia dalam pemikiran ini tidak dimaknai hanya sekedar membangun infrastruktur ataupun suprastruktur secara fisik saja, tetapi jauh daripada itu yang lebih penting adalah membangun manusia Indonesia yang berkeadaban. Gagasan nawacita yang memahami pembangunan Indonesia dari pinggiran merupakan bentuk lain dari apa yang disebut sebagai tindakan afirmatif.

Membangun Indonesia dari pinggiran memiliki makna yang sama dengan teori tentang negara rasial oleh James dan Redding (2005). Dijelaskan bahwa membangun negara merupakan komposisi dari berbagai macam institusi, kebijakan, kondisi dan aturan yang mendukung dan menghadirkan negara dalam hubungan sosial untuk mengingatkan bahwa setiap institusi adalah lembaga rasial yang berkaitan satu sama lain (James & Redding, 2005).

Kehadiran negara pada wilayah-wilayah pinggiran adalah salah satu bentuk arah baru yang harus dimasukkan dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan. Proses pembelajaran yang terlalu simbolis sesungguhnya merupakan praktik tidak hadirnya negara dalam kondisi yang dimanifestasikan dalam kebijakan negara yang terlalu berpusat di Jawa saja. Hal inilah yang kemudian memunculkan adanya segregasi sosial antara warga negara yang berasal dari pinggiran dan warga negara yang berada di perkotaan yang pada akhirnya akan mengikis keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan.

Sudah menjadi tanggung pendidikan kewarganegaraan sebagai pilar pembangunan Indonesia dalam memperbarui arah pembangunan bangsa Indonesia saat ini. Ada dimensi lain yang juga penting adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan harus dimaknasi sebagai politik pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat identitas lokal yang sangat kuat di daerah-daerah terluar dan terdepan Indonesia. Seringkali, pembangunan daerah-daerah yang dilakukan hanya berfokus kepada teknologi tanpa menghiraukan ideologi. Sehingga, jangan heran apabila gerakan-gerakan separatis justru muncul di daerah-daerah pinggiran daripada daerah perkotaan. Ada kesenjangan sosial yang belum terjawab pendidikan kewarganegaraan dalam realitas yang seperti ini.

1

Menolak Negara Lemah, Reformasi Sistem, Penegakan Hukum, Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

Prinsip nawacita keempat menawarkan tema besar yang sangat multidimensi dalam kacamata politik pendidikan saat ini. Pendidikan kewarganegaraan saat ini seharusnya mendidik seluruh entitas bangsa Indonesia untuk menghadirkan negara yang kuat, dan menolak negara lemah terhadap kekuatan ekonomi politik yang tidak berpihak kepada bangsa. Di sisi lain, dalam rangka menghadirkan negara kuat, reformasi sistem adalah salah satu mekanisme yang harus ditempuh untuk mengelola negara kuat seperti yang dicita-citakan.

Dalam rangka mendorong pendidikan kewarganegaraan sebagai kekuatan untuk menolak negara lemah, ada dua teori dasar yang bisa digunakan sebagai cara untuk mewujudkan negara kuat. Meminjam gagasan yang disampaikan oleh Lipset (2007) dijelaskan bahwa untuk membangun negara kuat membutuhkan adanya legitimasi dan efektifitas pemerintahan sebagai dimensi pembacaan pendidikan kewarganegaraan yang integratif. Legitimasi dimaksudkan bahwa adanya dorongan warga negara kepada negara atau kekuatan negara kepada warga negara untuk menghasilkan dan menjaga kepercayaan politik dua pihak dalam ruang institusi politik yang secara nalar diterima dengan baik oleh masyarakat (Lipset, 2007).

Selanjutnya, untuk menolak negara lemah juga dibutuhkan adanya efektifitas sebagai konsekuensi logis atas legitimasi yang sudah membumi di sebuah pemerintahan. Efektifitas dalam bingkai ini dimaknai sebagai ukuran keberhasilan tentang kepuasan warga negara kepada pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol atas kekuatan-kekuatan penting seperti aspek bisnis dan militer (Lipset, 2007). Efektifitas inilah yang menjadi perhatian penting bagaimana pendidikan kewarganegaraan nampaknya tidak hanya sekedar dimaknai sebagai doktrinasi nilai bagi warga negara, tetapi juga menjadi jiwa dalam membangun negara kuat dengan mekanisme reformasi sistem, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. mekanisme-mekanisme ini adalah proses untuk membangun pemerintahan yang bermartabat dan terpercaya sebagai indikator capaian negara kuat.

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

Keringnya lahan amal pendidikan kewarganegaraan sebagai pilar membangun bangsa adalah masih difahaminya pendidikan kewarganegaraan hanya sebagai metodologis semata. Pendidikan kewarganegaraan dimaknai sebagai metode dan teknik pengajaran bagi peserta didik oleh guru di dalam kelas, tanpa mencermati realitas sosial. Kondisi yang seperti ini hanya menjebak pendidikan kewarganegaraan pada deskripsi saja, tidak ada peningkatan kualitas hidup yang terkandung di dalamnya. Pemahaman yang seperti ini hanya akan membatasi daya kembang warga negara pada tataran dasar dan tidak mengangkat kekuatan elite di level atas. Ada semacam stagnasi yang tidak bisa dijawab oleh pendidikan kewarganegaraan akibat terpejaranya pendidikan kewarganegaraan pada tataran metodologis saja. Kondisi seperti ini amat memprihatinkan jika tidak segera diubah.

Seharusnya, pendidikan kewarganegaraan dimaknai sebagai cara untuk membebaskan manusia. pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sekedar mengajarkan kepada siswa di depan kelas dengan fasilitas teknologi yang sangat memadai, tetapi pendidikan kewarganegaraan juga dianggap sebagai praksis sosial yang memberikan bantuan untuk membebaskan manusia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh (Freire, 2007).

Meningkatkan kualitas hidup manusia tidak hanya sekedar meningkatkan jenjang pendidikannya, tetapi bagaimana manusia Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan bisa keluar dari penjara metodologis yang menghambat mereka untuk menjawab tantangan dan masalah zaman yang terus berkembang. Pendidikan kewarganegaraan adalah misi strategis untuk menciptakan kondisi dimana negara menjadi bagian dari kebebasan manusia yang ada di dalamnya. Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk ijtihad untuk memperkuat individu melalui ilmu pengetahuan dan pengembangan keterampilan kritis dan nilai (Harland, 2009).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai cara peningkatan kualitas hidup manusia sangat erat kaitannya dengan kebebasan manusia dalam pendidikan untuk berkontribusi terhadap perubahan sosial, dan mampu menjadikan dunia sebagai tempat terbaik untuk menjadi tempat tinggal manusia (Harland, 2009). Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi aktifitas yang dirancang untuk menanamkan kreatifitas intelektual, otonomi dan kegembiraan. Dimensi ini sekaligus menjadi cara untuk berfikir kritis yang merupakan kombinasi dari intelektual yang luas dan spesialisasi ilmu pengetahuan.

Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi aktifitas yang komprehensif dan toleran terhadap keberagaman ide dan pengalaman yang menjadi sumber informasi partisipatif di dalam kehidupan masyarakat dan keterampilan komunikasi yang efektif (Harland, 2009). Menguatkan peran pendidikan kewarganegaraan sebagai posisi sentral peningkatan kualitas hidup manusia adalah tuntutan sekaligus tanggung jawab yang secepatnya diubah arahnya agar mampu

bersinergi dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang sudah termaktub dalam konstitusi.

Meningkatkan Produktivitas & Daya Saing Internasional

Nawacita keenam yang menjadi rujukan arah baru pendidikan kewarganegaraan saat ini adalah dengan meningkatkan produktifitas dan daya saing internasional bagi warga negara Indonesia. Mendudukkan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks daya saing internasional sangat erat dengan ide tentang kompetisi global. Kompetisi global memiliki karakter yang dibentuk dari jaringan yang diikat oleh beberapa negara, institusi, dan masyarakat yang interdependen dalam runag ekonomi global (Deresky, 2002).

Untuk meningkatkan produktifitas dalam memenangkan daya saing internasional tidak mungkin mengesampingkan *the invisible hand* (tangan tak terlihat) dalam kompetisi global. Meningkatkan produktifitas tidak hanya sekedar menambah jumlah lapangan kerja atau tenaga kerjanya, tetapi juga berkaitan erat dengan fenomena peningkatan hilangnya batas-batas negara di dunia. Di tengah-tengah fenomena yang seperti ini, penulis berinisiatif memposisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai cara untuk mendidik warga negara sebagai bagian dari wilayah global yang tanpa batas negara tersebut.

Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi alat politik pemerintahan untuk membangun kesadaran komunitas global bagi warga negara untuk menyadari kompetisi internasional saat ini. Praktik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang sangat kaku yang hanya berbentuk doktrin hanya akan menciptakan warga negara yang tidak berbeda dengan robot-robot akademik dengan mekanisme kepatuhan kepada guru nya. Kondisi yang demikian ini akan semakin menyingkirkan warga negara Indonesia dalam pertarungan kompetisi glonal.

Pendidikan kewarganegaraan seharusnya bisa menjadi *the invisible hand* (tangan tak terlihat) untuk merancang kesiapan warga negara dalam proses memenangkan kompetisi global ini. Pendidikan kewarganegaraan jangan pernah dimaknai sebagai proses ritual yang tersakralisasi oleh produk yang bernama kurikulum. Sehingga, tidak ada dinamisasi dan kreasi yang muncul dari proses kewarganegaraan tersebut.

Merancang peningkatan produktifitas rakyat sama artinya dengan merancang partisipasi warga negara dalam pembangunan bangsa. Itu sebabnya, bukan hal yang tabu jika pendidikan kewarganegaraan dimaknai sebagai bagian yang terintegrasi dalam memainkan peran pertarungan global dengan basis produktifitas warga negara. Menarik kiranya jika pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi *the invisible hand* (tangan tak terlihat) dalam propaganda nasional untuk meningkatkan daya saing internasional.

Kemandirian Ekonomi dan Menggerakkan Ekonomi Domestik

1
Nawacita ketujuh adalah dengan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Mengutip apa yang disampaikan oleh Fox, Fox, & Gilson (2016) dijelaskan bahwa strategi penguatan ekonomi domestik adalah dengan meningkatkan integrasi antara perusahaan dengan analisis dan pelaksanaan keamanan hukum domestik. Pada posisi ini, peran pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat sentral, karena dari mekanisme yang terstruktur rapi akan memunculkan apa yang disebut sebagai gerakan ekonomi domestik. Di sisi lain, dukungan kuat dari pemerintah juga sangat penting sebagai bentuk kolaboratif antara lembaga pendidikan dengan kebijakan formal pemerintahan (Fox, Fox, & Gilson, 2016).

Selain membangun kemandirian ekonomi, hal lain yang dirasa cukup penting adalah dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal. Apa yang dijelaskan oleh Eisinger (1983) menekankan bahwa sesungguhnya kemandirian ekonomi hanya akan bisa dibangun apabila ada gerakan ekonomi lokal yang aktif. Di sisi lain, kecenderungan untuk mendorong ekonomi lokal yang berasal dari sektor-sektor vital adalah bagian dari kontribusi pendidikan sebagai corongnya pengembangan dan penelitian ekonomis di sebuah negara. Poin yang juga penting adalah bahwa pemerintah dibantu lembaga pendidikan harus mampu mengontrol sumber daya yang tersedia untuk mendukung kepentingan ekonomi lokal (Eisinger, 1983).

Revolusi Karakter Bangsa

Ide nawacita kedelapan adalah berkaitan dengan revolusi karakter atau yang sering dikenal dengan revolusi mental. Prinsip ini nampaknya merupakan prinsip yang paling relevan dengan mekanisme tujuan diselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Selain pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk membebaskan manusia, pendidikan kewarganegaraan juga seharusnya menjadi konsep kondisi ideal seorang warga negara. pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi pembaharu yang memperbaiki atau lebih akurat daripada kondisi warga negara yang sebelumnya (Goodwin, 2005).

Pendidikan kewarganegaraan seharusnya dimaknai sebagai semua praktik untuk pergantian, dan atau transformasi fundamental yang dilakukan oleh gerakan populer baik itu non reguler, ekstrakonstitusional, dan atau wacana gaya hidup (Goodwin, 2005). Dalam paradigma yang seperti ini, sangat tepat kiranya jika pendidikan kewarganegaraan yang dianggap sebagai revolusi karakter bangsa diterjemahkan tidak hanya sebagai mobilisasi massa dan perubahan rezim tetapi juga perubahan fundamental pada tataran sosial, ekonomi, budaya.

Revolusi karakter bangsa seharusnya menjadi gagasan utama bagi gerakan sosial di dalam Pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, sangat bijak rasanya jika pendidikan kewarganegaraan tidak cukup diposisikan pada tataran seremonial saja, tetapi harus mengakar

kuat di setiap lini kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia yang bermartabat. Memahami pendidikan kewarganegaraan sebagai strategi revolusi karakter adalah dengan menganggap proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas tidak dipenjara oleh ritual kurikulum atau tuntutan pemenuhan transkrip nilai, tetapi sebagai momentum untuk merevolusi apa yang ada di setiap kepala peserta didik sebagai subjek dan objek pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini.

Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial

Prinsip terakhir dalam nawacita adalah adanya penghargaan tertinggi bagi keberagaman bangsa. Memperteguh kebhinnekaan adalah instrumen paling penting dalam proses pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Gagasan utama dari konsep ini adalah apa keuntungan pendidikan yang dapat diambil dari keberagaman ini. Pertama, pendidikan kewarganegaraan dengan basis memperteguh kebhinnekaan adalah cara untuk mengimprovisasi penguatan proses pembelajaran yang disebut dengan "*pedagogic vision of diversity*". Visi keberagaman dalam pedagogis adalah mandat inti dari proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di dalam kelas (Gurin, 2007).

Kedua, pendidikan kewarganegaraan seharusnya mampu membangun sentimen dan keterampilan warga negara dan kepemimpinan di era demokrasi keberagaman. Pemahaman merawat keberagaman adalah konsep dalam mengkonstruksi warga negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Itu sebabnya, sangat relevan nampaknya untuk mendorong pendidikan kewarganegaraan sebagai pengawal keberagaman dan demokrasi di Indonesia, baik dalam tataran teoritis dan tataran praktis.

Simpulan

Secara garis besar, artikel ini merupakan wujud ekstraksi yang dilakukan penulis dalam rangka ijtihad menemukan formulasi baru bagaimana memahami, menerapkan, dan mengevaluasi arah proses pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Ada dua simpulan yang didapat dari hasil ijtihad ini. Pertama, pemaknaan pendidikan kewarganegaraan yang selama ini hanya berhenti pada level ritualisasi proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan akan melahirkan generasi robot yang hanya mengejar terpenuhinya syarat wajib mata pelajaran atau mata kuliah di institusi pendidikan yang sedang ditempuh. Ritualisasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak mampu menciptakan pemahaman dan tujuan utama mengapa proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan. Di sisi lain, makna dasar pendidikan kewarganegaraan yang seharusnya menjadi pemicu adanya pembebasan manusia akan semakin terhambat pada aspek prosedural.

Kedua, artikel ini juga berkesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus dibebaskan dari penjara formalitas. Pemikiran ini lebih mengupayakan bahwa proses mendidik warga negara

sebisa mungkin meminimalisir doktrinasi yang bersifat absolut. Mendidik warga negara harus dengan membebaskan warga negara menentukan apa dan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dijalankan. Sehingga, pendidikan kewarganegaraan akan menemukan roh nya sebagai pendidikan yang demokratis, pendidikan yang memberikan kebebasan berekspresi bagi warga negara dalam mencapai arah baru pendidikan kewarganegaraan seperti termaktub dalam Nawacita. Pada kondisi ini diharapkan pendidikan kewarganegaraan tidak lagi dianggap sebagai mata kuliah atau pelajaran wajib, namun lebih daripada itu, pendidikan kewarganegaraan adalah kebutuhan dan keinginan bagi seluruh warga negaranya.

Daftar Isi

- Deresky, H. (2002). *Global Management: Strategic and Interpersonal*. New Jersey: Prentice Hall.
- 8
Diaz, V., & McGee, P. (2006). Distributed Learning Objects: An Open Knowledge Management Model. In A. S. Metcalfe, *Knowledge Management and Higher Education A Critical Analysis* (pp. 147-178). London: Information Science Publishing.
- 11
Eisinger, P. K. (1983). MUNICIPAL RESIDENCY REQUIREMENTS AND THE LOCAL ECONOMY. *Social Science Quarterly*, Vol. 64, No. 1 , 85-96.
- 15
Ertman, T. (2005). State Formation and State Building in Europe. 7 In T. Janoski, R. Alford, A. Hicks, & M. Schwartz, *The Handbook of Political Sociology States, Civil Societies, and Globalization* (pp. 367-383). Cambridge: Cambridge University Press.
- 14
Fox, E. G., Fox, M. B., & Gilson, R. J. (2016). ECONOMIC CRISIS AND THE INTEGRATION OF LAW AND FINANCE: THE IMPACT OF VOLATILITY SPIKES. *Columbia Law Review*, Vol. 116, No. 2 , 325-407. 9
- 16
Freire, P. (2007). *Politik Pendidikan Kebudayaan Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 5
Goodwin, J. (2005). Revolutions and Revolutionary Movements. In T. Janoski, R. Alford, A. Hicks, & M. Schwartz, *The Handbook of Political Sociology States, Civil Societies, and Globalization* (pp. 404-422). Cambridge: Cambridge University Press.
- 6
Greenfeld, L., & Eastwood, J. (2005). Nationalism in Comparative Perspective. In T. Janoski, R. R. Alford, A. M. Hicks, & M. A. Shwartz, *The Handbook of Political Sociology States, Civil Societies, And Globalization* (pp. 247-265). Cambridge: Cambridge University Press.
- 12
Gurin, P. (2007). The Educational Value of Diversity. In P. Gurin, *Defending Diversity: Affirmative Action at the University of Michigan* (pp. 97-188). Michigan: The Univesity of Michigan Press.
- 4
Harland, T. (2009). The University, Neoliberal Reform and the Liberal Educational Ideal. In M. Tight, K. H. Mok, J. Huisman, & 2 C. Morphew, *The Routledge International Handbook of Higher Education* (pp. 511-522). New York: Routledge.
- James, D. R., & Redding, K. (2005). Theories of Race and the State. In T. Janoski, R. Alford, A. M. Hicks, & M. A. Shwartz, *The Handbook of Political Sociology States, Civil Societies, and Globalization* (pp. 187-200). Cambridge: Cambridge University Press.

Bandung, 15-16 November 2016
Gedung Achmad Sanusi Universitas Pendidikan Indonesia
ISBN 978-602-8418-28-7

3

Karran, T. (2009). Academic Freedom: Essential Liberty or Extravagant Luxury? In L. Bell, H. Stevenson, & M. Neary, *The Future of Higher Education: Policy, Pedagogy and the Student Experience* (pp. 17-29). London: Continuum International Publishing Group.

Lipset, S. M. (2007). *Political Man Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rivai, A. B. (2015). Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Papua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran*, 1 (2), 266-287.

ARAH BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- 1 Taufik H. Simatupang. "Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2018
87 words — 2%
Crossref
- 2 Rebecca Chiyoko King-O'Riain. "Counting on the 'Celtic Tiger'", *Ethnicities*, 2007
38 words — 1%
Crossref
- 3 Karin Crawford. "Influences on academics' approaches to development: voices from below", *The International Journal for Academic Development*, 09/2010
31 words — 1%
Crossref
- 4 Wan Hu. "Chapter 5 Context and Comparison of Translation Programmes in China and the UK: Market Forces, Global Positions and Curriculum Content", *Springer Nature*, 2018
31 words — 1%
Crossref
- 5 Anoulak Kittikhoun. "Small state, big revolution: geography and the revolution in Laos", *Theory and Society*, 01/2009
28 words — 1%
Crossref
- 6 Josef Weidenholzer. "The American and the European social dream: the competition of welfare regimes", *Journal of Comparative Social Welfare*, 4/2008
27 words — 1%
Crossref
- 7 Coffé, Hilde, and Catherine Bolzendahl. "Racial group differences

in support for citizenship duties and rights in the US: Racial differences citizenship duties and rights", Acta Politica, 2013.

Crossref

23 words — < 1 %

8 Patricia McGee, Vicki Suter, Jennifer Gurrie. "chapter 10 Over the Rainbow", IGI Global, 2005

Crossref

22 words — < 1 %

9 Bas de Jong. "Can Fluctuations in Prices or Volumes of a Security Trigger a Duty for Listed Companies to Disclose Inside Information?", European Business Organization Law Review, 2016

Crossref

15 words — < 1 %

10 Insan Firdaus. "Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018

Crossref

15 words — < 1 %

11 D. L. Imbroscio. "An Alternative Approach to Urban Economic Development: Exploring the Dimensions and Prospects of a Self-Reliance Strategy", Urban Affairs Review, 07/01/1995

Crossref

14 words — < 1 %

12 Christine Clark, Gwen Stowers. "chapter 5 Speaking with Trunks, Dancing with the "Pink Elephants"", IGI Global, 2016

Crossref

12 words — < 1 %

13 Ais - Irmawati, Udik Budi Wibowo, Arum Dwi Hastutiningsih. "PERAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM MENGURANGI BUTA AKSARA DI KABUPATEN KARIMUN*)", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

Crossref

12 words — < 1 %

14 Chrysovalantis Amountzias. "An investigation of the effects of income inequality on financial fragility: Evidence from Organization for Economic Co-operation and Development countries", International Journal of Finance &

11 words — < 1 %

Economics, 2018

Crossref

15 Igor Fedyukin. "'Westernizations' from Peter I to Meiji: war, political competition, and institutional change", *Theory and Society*, 2018 10 words — < 1%

Crossref

16 Nanang Martono. "Kritik Sosial Terhadap Praktik Pendidikan Dalam Film 'Laskar Pelangi'", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2010 9 words — < 1%

Crossref

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON